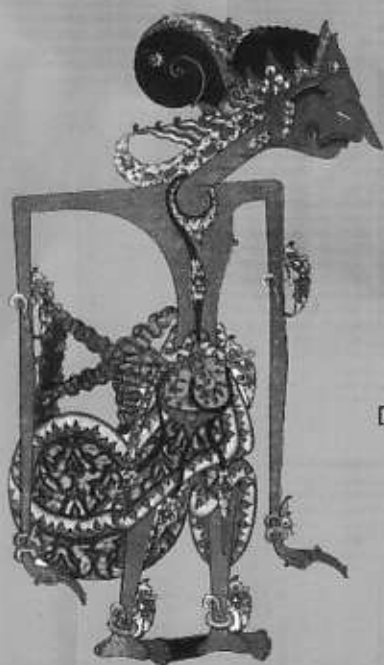


Prof. Dr. Wasino, M.Hum., dkk.

KEPEMIMPINAN DI INDONESIA



DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN BUDAYA



Editor:
Drs. Nawiyanto, MA., Ph.D.



LB
LaksBang

PENGANTAR EDITOR

Buku ini berawal dari kumpulan makalah yang dipresentasikan dalam Kegiatan Seminar Nasional bertema "Revitalisasi Nilai nilai Kepemimpinan tradisional dalam membangun Karakter Bangsa", yang dilaksanakan di Fakultas Sastra Universitas Jember pada tanggal 28 September 2013. Secara praktis seminar ini dipandang penting dan strategis dalam rangka memberikan kontribusi kearah pencarian solusi bagi permasalahan aktual berupa krisis kepemimpinan yang tengah yang sosok pemimpin dan kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan mengemudikan bangsa dan negara Indonesia menuju kearah kemakmuran dan kejayaan. Alih-alih kita justru dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak pemimpin di negeri ini seringkali menjadi bagian dari problem ketimbang solusi, melalui praktek kekuasaan yang korup dan manipulatif. Persoalan ini urgen untuk segera diselesaikan bila tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara gagal (*failing state*) yang mendekat ke jurang kehancuran.

Tidak diragukan lagi bahwa arah dan jalannya sejarah ditentukan oleh pemimpin. Pemikir filsafat sejarah dan Bapak psikoanalisis, Sigmund Freud menyatakan bahwa tidak mungkin memisahkan sejarah dari pengaruh pemimpin atau orang besar. Sebuah bangsa atau entitas kolektif membutuhkan kehadiran pemimpin, sebagai figur yang mereka ikuti, kagumi dan teladani atau sebaliknya sebagai figur yang mereka benci, hujat, caci-maki dan perlakukan dengan buruk. Di tangan para pemimpin, kelompok massa

dipengaruhi, dibentuk dan diarahkan pada satu tujuan. Adalah satu orang, bernama Musa yang membentuk bangsa Yahudi, demikian kata Freud.¹ Musa memimpin eksodus bangsa Israel selama puluhan tahun meniggalkan perbudakan di Negeri Mesir. Sejarah bangsa Jepang memberi ilustrasi lain bagaimana pemimpin sangat menentukan arah sejarah Jepang dan mengarahkan energi bangsa Jepang menuju kemajuan dan kemakmuran. Jepang yang terancam kekuatan kolonialis Barat yang tengah membagi-bagi dunia dan memasukkan ke dalam imperium politik mereka merespons dengan tantangan ini di bawah Kaisar Meiji dengan melakukan program restorasi. Kaisar Meiji mengambil langkah ini dengan dukungan kelompok pemimpin yang progresif dan visioner.² Kemerdekaan bangsa ini juga dicapai berkat peran para pemimpin yang dalam sebutan filsuf sejarah Inggris Arnold Joseph Toynbee dimasukkan dalam kelompok minoritas kreatif. Secara kuantitatif mereka kecil jumlahnya, namun mampu mengarusutamakan gagasan nasionalisme dan melahirkan gerakan antkolonial modern yang membuahkan kemerdekaan. Dengan kecerdikan kelompok minoritas kreatif, masyarakat yang tengah mengalami degenerasi ke arah kehancuran dapat direvitalisasi sehingga terhindar dari kematian, dan bahkan memasuki kejayaan.

Bangsa Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat, kreatif, dan visioner, bermoral dan dapat diteladani untuk mengantar bangsa ini memasuki zaman kemakmuran. Indonesia perlu pemimpin yang mampu menjawab persoalan-persoalan krusial

¹ Bruce Mazlish, *The Riddle of History: The Great Speculators from Vico to Freud* (New York: Harper and Row, 1966), hlm. 414-415.

² Masaki Kosaka, "The Rebirth of Japan and the Impact of the West", dalam Gay S. Metraux dan Francois Crouzet (ed.), *The New Asia: Readings in the History of Mankind* (New York: The New American Library, 1965), hlm. 378-379.

dan kritis yang tengah mendera Indonesia sehingga bangsa ini dapat keluar dari lingkaran setan permasalahan yang selalu berulang. Indonesia perlu pemimpin yang mampu menyembuhkan bangsa ini dari penyakit memori pendek yang membuatnya tidak tahu bagaimana belajar dari sejarah dan kearifan sejarah. Kita memerlukan para pemimpin bangsa yang mampu menciptakan negeri ini menjadi semacam Camelot, sebagai tempat dimana setiap potensi dapat berkembang secara penuh, setiap harapan menemukan kenyataan, sebagai tempat dimana setiap warga negara dapat mengejar mimpi-mimpinya, menikmati kebebasan mereka yang paling asasi untuk berekspresi dan berkreasi dalam bidang agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Buku ini berisi bahasan bertema Kepemimpinan (di) Indonesia melalui perspektif sejarah dan budaya. Dalam kaitan dengan upaya menjawab persoalan krisis kepemimpinan (di) Indonesia, teranyam jalinan gagasan utama yang dapat dipetakan berikut ini. Pada satu sisi ada pandangan yang menekankan pentingnya modernisasi. Tulisan-tulisan Sri Margana dan Retno Winarni secara kuat merepresentasikan pandangan semacam ini. Berbasis pada kasus Istana Pakulaman, Sri Margana berargumentasi bahwa kaum elite bersikap responsif terhadap ide-ide modern sebagai cara beradaptasi dengan perubahan zaman. Pendidikan dan ekonomi (perkebunan) modern diadopsi untuk mempertahankan status dan posisi agar tidak tergulung perubahan. Perubahan kearah modernitas ini, namun demikian, belum mengantarkan pada praktik kepemimpinan yang berorientasi populistis, sebaliknya melahirkan apa yang distilahkan Margana sebagai "paradoks kebudayaan", yang memberatkan kehidupan rakyat. Tulisan Retno Winarni juga menyuarakan kepekaan para bupati di wilayah Besuki terhadap tantangan perubahan. Pendidikan modern diadopsi untuk beradaptasi dengan rasionalisasi dan modernisasi birokrasi yang mengancam status dan posisi

para bupati dan keturunannya. Pada saat yang sama modernisasi ternyata juga melahirkan dorongan revitalisasi tradisi, namun bagaimana implikasinya terhadap kehidupan rakyat masih menjadi pertanyaan masih menjadi persoalan terbuka bagi kajian-kajian lebih jauh.

Pandangan lain menekankan perlunya revitalisasi nilai-nilai kepemimpinan tradisional dalam mengatasi krisis kepemimpinan (di) Indonesia. Tulisan Krisnadi secara kuat merepresentasikan pandangan ini. Diargumentasikan bahwa krisis yang mendera Indonesia secara berkepanjangan terkait dengan krisis kepemimpinan Indonesia. Akar persoalan, menurut Krisnadi, terkait dengan "dosa sejarah" dan kegagalan bangsa ini dalam berdialog dengan Barat dengan kapitalismenya. Karena budaya barat dalam konteks ini merupakan problem ketimbang solusi, maka panasea alias obat mujarab atas persoalan ini menurutnya perlu dicari dan digali dari budaya sendiri. Dan dalam hal ini, budaya Jawa menyediakan reservoir inspirasi dan kearifan khususnya etos dan nilai-nilai keksatrian Jawa.

Jalan tengah sebagai kemungkinan untuk menemukan kepemimpinan yang ideal bagi Indonesia disarankan dalam tulisan Wasino yang memaparkan konsepsi kepemimpinan dalam budaya Jawa dan tipologi kepemimpinan. Diargumentasikan bahwa kepemimpinan menjamin terciptanya harmoni sosial dan dalam konteks zaman yang berubah, demikian Wasino, diperlukan bukan hanya kemampuan memahami prosedur organisasional, melainkan juga perilaku yang dapat diteladani bagi masyarakat. Sikap dan perilaku keteladanan yang diperlukan dapat digali inspirasi dan modelnya baik dari kebudayaan lokal (Jawa) maupun budaya barat. Dengan demikian, diyakini bahwa elemen kedua budaya dapat diadopsi dan diserap secara selektif. Budaya Barat dan Timur bukanlah dua kutub yang bertolakbelakang atau bahkan bertabrakan, melainkan bisa saling

akomodatif dan komplementer.

Tulisan Dewi Salindri, Siti Sumardiati, dan Edy Burhan Arifin yang menyoroti peran elite religius dalam entitas budaya yang berbeda bisa ditempatkan pada kelompok jalan tengah. Dalam tulisan tentang Coolen, seorang pemimpin Kristen di Ngoro (Jombang), Salindri mengilustrasikan sosok pemimpin polimorfik yang mampu menggerakkan penduduk menuju kesejahteraan ekonomi dan spiritual melalui sintesis nilai-nilai tradisi Jawa dan Barat. Sementara itu, tulisan Sumardiati menekankan besarnya peran kepemimpinan kyai dalam proses islamisasi maupun modernisasi. Kepemimpinan Islam pada masa kerajaan tradisional dan masa pergerakan, demikian Sumardiati, memperlihatkan kemampuan kyai dan alim-ulama dalam berdialog dengan ilmu pengetahuan modern dan tantangan zaman, bukan hanya penguasaan doktrin-doktrin dan ajaran agama Islam. Demikian pula, seperti diargumentasikan Arifin, dukun dalam masyarakat Tengger adalah sosok pemimpin polimorfik, menguasai banyak bidang dari urusan ritual, penyebaran agama, hingga urusan pertanian dan konsultatif. Pada masa Orde Baru dukun Tengger juga berperan sebagai agen perubahan dan pusat konsultasi. Nilai inspiratif dukun Tengger bagi kepemimpinan nasional adalah pentingnya kejujuran, tidak iri dan berwawasan luas.

Tulisan Bambang Samsu Badriyanto membandingkan kepemimpinan dalam budaya Jawa dan Madura. Dalam kedua kelompok budaya yang sama-sama kuat sifat paternalistiknya terdapat perbedaan menonjol. Menurut Badriyanto, masyarakat Jawa lebih mengidolakan pemimpin formal (elite birokrasi) sebagai figur panutan untuk dijadikan teladan, sedangkan bagi Masyarakat Madura pemimpin tidak resmi, khususnya kyai dan talim-ulama menjadi sosok panutan. Dengan karakteristik demikian, proses dan dinamika sosial dalam kedua kelompok budaya berbeda pula. Dalam konteks kepemimpinan nasional,

orientasi paternalistik dapat bersifat kontraproduktif. Pandangan ini mengandaikan kebutuhan akan kepemimpinan yang bersifat majemuk dan demokratis, bukan monomorfik dengan elite religius maupun birokrasi sebagai berada pada posisi puncak kepemimpinan.

Tulisan Dadang Supardan mendiskusikan dinamika kepemimpinan dalam budaya Sunda. Menurut Supardan, dalam perspektif formal kepemimpinan Sunda berada dalam "krisis". Meskipun budaya Sunda mempunyai tradisi politik yang panjang dan tua, bahkan lebih tua dari tradisi politik Jawa, namun nilai-nilai kesundaan gagal mewarnai kepemimpinan nasional. Menurut Supardan, kegagalan ini disebabkan karena berakhirnya kekuasaan politik Sunda akibat perkembangan pengaruh Islam, tamplinya Cirebon dan Banten sebagai kerajaan Islam, dan tenggelam lebih jauh akibat dominasi elite Jawa dalam pentas pergerakan dan politik nasional. Akan tetapi, dalam perspektif informal-kultural, demikian menurut Supardan, kepemimpinan Sunda menemukan kompensasi atas kekalahan dalam panggung kepemimpinan formal/politik. Dalam konteks informal-kultural, kepemimpinan bersifat majemuk, setiap bidang mempunyai figur yang layak disebut pemimpin. Bagi Supardan, pemimpin sejati tidak terkait dengan jabatan, melainkan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam bidang apapun dan menunjukkan tanggung-jawab besar atas pekerjaan yang dilakukannya..

Tulisan Sri Ana Hndayani menyajikan sebuah garis besar kepemimpinan nasional dari masa tradisional hingga era reformasi. Diargumentasikan bahwa di Indonesia kepemimpinan nasional dipengaruhi budaya elite dan masyarakatnya. Kepemimpinan tradisional diraih melalui jalur genealogis, kepemimpinan kolonial ditandai orientasi legal rasional, yang mengedepankan pentingnya pendidikan namun masih tetap memperhitungkan jalur tradisional. Kepemimpinan nasional muncul lewat banyak

jalur: melalui jalur pendidikan, birokrasi, partai, dan wirausahaan. Dalam perjalanan panjang kepemimpinan nasional, menurut Handayani, masyarakat masih menantikan dan memimpikan datangnya pemimpin yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, sebagaimana yang mereka (rakyat) bayangkan, bukan seperti yang dicitrakan atau dipropagandakan elite politik atau pemerintah.

Mudah-mudahan tulisan yang terangkum dalam bunga rampai ini dapat ikut mengetuk pintu dan hati nurani kaum elite di negeri ini akan tanggung jawabnya untuk membawa masyarakat, bangsa, dan negara menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera.

Editor,

Nawiyanto

DAFTAR PUSTAKA

- Mazlish, Bruce. *The Riddle of History: The Great Speculators from Vico to Freud* New York: Harper and Row, 1966.
- Masaki Kosaka, "The Rebirth of Japan and the Impact of the West", dalam Guy S. Metraux dan Francois Crouzet (ed). *The New Asia: Readings in the History of Mankind* New York: The New American Library, 1965.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Pengantar Editor	xi
Daftar Isi	xix
Bab 1	
Nilai-nilai Kepemimpinan Menurut Kebudayaan Jawa	
<i>Wasino</i>	1
Bab 2	
Westernisasi dan Paradoks Kebudayaan: Elite Istana Jawa pada Masa Paku Alam V (1878-1900)	
<i>Sri Margana</i>	19
Bab 3	
Priyayi, Edukasi dan Tradisi: Adaptasi Priyayi terhadap Tuntutan Modernisasi Edukasi dan Tradisi	
<i>Retno Winarni</i>	37
Bab 4	
Revitalisasi Nilai-nilai Ksatria Jawa dalam Membangun Martabat Bangsa	
<i>IG Krisnadi</i>	61
Bab 5	
Kepemimpinan Kertanegara dari Kerajaan Singhasari Abad 12-13	
<i>Ratna Endang W.</i>	91

Bab 6	Coentraad Laurens Coolen sebagai Pemimpin "Kristen Jawa" di Ngoro Kabupaten Jombang Jawa Timur Tahun 1827-1854 <i>Dewi Salindri</i>	107
Bab 7	Kepemimpinan Islam Tradisional dan Kepemimpinan Islam Masa Pergerakan Nasional di Indonesia <i>Siti Sumardiati</i>	121
Bab 8	Dukun dalam Masyarakat Tengger: Refleksi dan Revalidasi Kepemimpinan Tradisional <i>Edy Burhan Arifin</i>	141
Bab 9	Peran Pemimpin dalam Dinamika Masyarakat Paternalistik (Studi Komparasi Antara Etnik Jawa dan Madura) <i>Bambang Samsu Badriyanto</i>	165
Bab 10	Dinamika Kepemimpinan "Urang Sunda: Perspektif Kepemimpinan Formal dan Kultural- Informal <i>Dadang Supardan</i>	185
Bab 11	Kepemimpinan di Indonesia dalam Perspektif Historis <i>Sri Ana Handayani</i>	209

BAB 1

NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN MENURUT KEBUDAYAAN JAWA

Wasino¹

A. Pendahuluan

Dalam setiap masyarakat diperlukan kehadiran seorang pemimpin. Hal itu terjadi pada masyarakat paling kecil, yaitu keluarga hingga masyarakat yang sangat besar kompleksitasnya seperti negara dan bangsa. Tidak ada satupun masyarakat yang tanpa kehadiran pemimpin.

Dalam teori sosial, pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan dalam mengontrol anggotanya. Kekuasaan itu tercermin dari kemampuannya dalam mengajak anggota mengikuti perintah atau ajakannya. Ajakan atau perintah tersebut tercermin dalam aturan tertulis, perkataan, maupun perilaku. Melalui kemampuan tersebut seorang pemimpin mampu mengorganisasi anggotanya. Pemimpin merupakan kelompok elite. Secara struktural mereka berada di atas rakyat kebanyakan. Posisi demikian dikaitkan dengan wewenang dan dibawa yang mereka miliki

¹ Prof. Dr. Wasino, M.Hum. Guru besar Sejarah Sosial, Dosen pada Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

suatu makna dan simbol baru yang diciptakan oleh rakyat sesuai dengan figur rakyat yang diinginkan. Gaya kepemimpinan yang lahir dari keinginan rakyat beserta simbol dan tindakan rakyat yang benar-benar memihak telah tercipta. Kalau masa tradisional kepemimpinan diciptakan oleh elite dengan berbagai pencitraannya agar rakyat menjadi tunduk dan takut, maka sekarang pemimpin dituntut untuk mengikuti keinginan rakyat yang dianggap lebih berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. *Konsep Kekuasaan Jawa* (Jakarta: Obor, 1978).
- Anthov, Hans dan Sven Cederroth, "Pendahuluan" dalam Hans Anthov dan Sven Cederroth (Penyunting). *Kepemimpinan Jawa Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*. Penerjemah Soemitro. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Burger, D.H. *Sejarah Sosiologis Indonesia*. Djakarta: Djambatan, 1967.
- J.R. Kurnia. "Lakon Di panggung rakyat" dalam *Kompas*, 7 September 2013
- Kartodirdjo, Sartono. "Berkembang dan runtuhnya Aristokrasi tradisional Jawa", dalam Hans Anthov dan Sven Cederroth (Penyunting). *Kepemimpinan Jawa Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*. Penerjemah Soemitro. Jakarta: Yayasan Obor. 2001.
- Kompas. "Kepemimpinan SSSG: Jokowi Pemimpin yang Melayani Rakyat", 20 September, 2013.
- Kuntowijoyo. *Raja Priyayi dan Kawula*. Yogyakarta: Ombak: 2006.
- Moedjanto, G. *Konsep Kekuasaan Jawa : Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius. 1987.
- Moedjanto, G. "Konsep Kepemimpinan dan Kekuasaan Jawa Tempo Dulu", dalam Hans Anthov dan Sven Cederroth (Penyunting). *Kepemimpinan Jawa Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*. Penerjemah Soemitro. Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Pemberton, John. *On The Subject of Java*. Penerjemah Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Mata Bangsa. 2003.
- Surjomiharjo, Abdurachman. *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia. 2000.